

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan berkepentingan dengan pengukuran kinerja keuangannya. Kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan yang dapat dilihat dari laporan keuangannya. Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba merupakan fokus utama dalam penilaian kinerja keuangan perusahaan. Laba bukan saja sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban penyandang dana tetapi juga sebagai unsur penciptaan nilai (*creation value*) perusahaan yang memperlihatkan prospek perusahaan dimasa mendatang.

Kinerja keuangan perusahaan dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang menunjukkan kondisi perusahaan dalam keadaan baik atau buruk. Saat kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan buruk, para *stakeholder* akan memakai analisis laporan keuangan untuk menilai kinerja di masa lalu, posisi perusahaan sekarang serta menilai potensi dan resiko perusahaan di masa mendatang. Apabila kinerja keuangan suatu perusahaan baik maka investor akan tertarik untuk menginvestasikan dana yang mereka miliki kepada perusahaan sehingga nilai perusahaan juga akan meningkat. Keadaan ini akan membuat perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang saat ini semakin ketat.

Penilaian kinerja keuangan perusahaan penting dilakukan baik oleh manajemen, pemegang saham maupun pemerintah. Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran

organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya, agar memperoleh tindakan dan hasil yang diinginkan.

Dengan adanya *Good Corporate Governance* (GCG) para pemegang saham dan investor menjadi yakin akan memperoleh *return* atas investasinya, karena dapat memberikan perlindungan efektif bagi pemegang saham dan investor (Makhrus,2017). GCG adalah sistem dan struktur yang baik dalam mengelola perusahaan dengan meningkatkan nilai pemegang saham mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan perusahaan (*stakeholder*), seperti: kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas (Syakhroza, 2014). perusahaan meyakini bahwa implementasi GCG merupakan bentuk lain penegakan etika bisnis dan etika kerja yang sudah lama menjadi komitmen perusahaan, dan implementasi GCG berhubungan dengan peningkatan nilai perusahaan.

Corporate Governance juga dapat membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya pertumbuhan yang efisien dalam perusahaan. Untuk mengawasi pihak manajemen agar tidak melakukan manajemen laba maka dibutuhkan penerapan GCG yang efektif. Komponen penting dalam pelaksanaan GCG efektif adalah adanya kepemilikan manajerial, kepemilikan institutional, komisaris independen, dan komite audit yang berkualitas.

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen (manajer). Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Menurut Tarigan dkk., dalam Nilayanti (2016), kepemilikan manajerial adalah kondisi

dimana manajer yang bertindak sebagai agen tetapi juga mendapatkan hak atas kepemilikan saham perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Samrotun (2020) dan Hermiyetti (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka kinerja perusahaan akan meningkat. Kepemilikan manajerial meningkatkan kinerja perusahaan karena manajer termotivasi untuk menggandakan upayanya sebagai bagian dari pemegang saham untuk mewujudkan kekayaan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian dari Gie (2019) dan Julasti, dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena direktur tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak efektif. Jika direktur tidak memiliki kepemilikan saham maka direktur tidak optimal meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan menguntungkan pihak pemilik saham.

UNMAS DENPASAR

Selain kepemilikan manajerial, komponen lain dalam pelaksanaan GCG efektif adalah kepemilikan institusional. Kepemilikan Institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dalam Samrotun, 2016). Dalam kepemilikan institusional ini, *stakeholder* juga bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan itu. Keberadaan investor institusional mampu menjadi mekanisme monitoring efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penerapan

kepemilikan insitucional mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian dari Candradewi, dkk. (2016) dan Hermiyetti (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin besar jumlah proporsi kepemilikan institusional, semakin meningkat juga kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal dan mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian dari Samrotun (2020) dan Nugrahawati (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kemungkinan disebabkan karena tinggi rendahnya kepemilikan insitucional menyebabkan proses monitoring terhadap manajer kurang efektif sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Nugrahawati (2019).

Selanjutnya, komisaris independen juga menjadi komponen penting dalam pelaksanaan GCG efektif. Dewan komisaris independen berperan penting bagi perusahaan, karena dapat mencegah adanya tindak manajemen yang tidak transparan. Adanya dewan komisaris independen maka kepentingan *stakeholder*, baik mayoritas maupun minoritas tidak diabaikan karena komisaris independen lebih bersikap netral terhadap keputusan yang dibuat oleh manajer. Berdasarkan penelitian dari Samrotun (2020) dan Sarafina (2017) menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti dewan komisaris independen sangat menentukan keberhasilan

perusahaan dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, sehingga dapat meminimalkan kerugian yang mungkin akan muncul. Selain itu dapat membantu perusahaan menghindari ancaman-ancaman dari luar, sehingga perusahaan mendapatkan keuntungan yang lebih, yang nantinya dapat meningkatkan kinerja keuangan. Namun, berbeda dengan penelitian dari Gie (2019) dan Yuliani (2018) yang menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena semakin banyak jumlah anggota dewan maka waktu yang diperlukan untuk pengambilan keputusan akan semakin lama karena sulitnya mengatur waktu untuk rapat keseluruhan anggota dewan. Dengan pengambilan keputusan yang kurang optimal akan berdampak pada pencapaian tujuan perusahaan yang lambat. Informasi mengenai peluang bisnis bagi perusahaan yang terlambat disampaikan dalam rapat anggota dewan komisaris menyebabkan peluang tersebut diambil alih oleh perusahaan saingan.

Komponen penting terakhir dalam pelaksanaan GCG efektif adalah komite audit. Komite audit berfungsi sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Komite audit bertugas untuk membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas internal dan eksternal audit. Pengawasan proses penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh komite audit dimulai dari awal penyusunan hingga laporan keuangan tersebut di audit oleh audit eksternal dan siap untuk di publikasikan. Berdasarkan penelitian dari Samrotun, dkk (2020) dan Sarafina (2017) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti bahwa Komite

audit merupakan salah satu bagian dari *stakeholder*, karena komite bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu melaksanakan tugas dewan komisaris, maka dengan semakin banyaknya anggota komite audit pengawasan yang berkaitan dengan keuangan dan prosedur akuntansi, sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat. Berbeda dengan penelitian dari Yuliani (2018) dan Gumilang (2018) yang menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini dapat disebabkan komite audit merupakan hal baru bagi perusahaan sehingga dalam pengawasan belum maksimal, akibatnya pembentukan komite audit yang baru ini juga masih mengalami kendala-kendala seperti masalah komunikasi dengan dewan komisaris, dewan direksi, auditor internal dan eksternal serta pihak lain sebagai aspek yang penting dalam keberhasilan kinerja komite audit.

Di Indonesia, kinerja keuangan perlu dilakukan pengawasan terhadap suatu perusahaan dalam sektor keuangan. Oleh sebab itu, Indonesia perlu memiliki system keuangan yang stabil secara fundamental dan berkesinambungan. Dalam pengawasan di sektor keuangan ini perlu diawasi agar dapat melindungi terutama kepentingan konsumen dan masyarakat. Selain itu, kinerja keuangan perusahaan disebut juga suatu penentuan yang mengukur suatu hal yang baik maupun buruk suatu perusahaan dalam prestasi kerja yang dilihat dari kondisi keuangannya pada periode tertentu. Dalam kondisi suatu keuangan dapat dianalisa berdasarkan alat-alat analisis keuangan.

Pada kenyataannya banyak perusahaan yang pernah melakukan manipulasi laporan keuangan. Isu manipulasi laporan keuangan oleh salah satu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu PT Kimia Farma Tbk.

Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa, sehingga dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99,56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32,6 milyar, atau 24,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit Industri Bahan Baku yaitu kesalahan berupa *overstated* penjualan sebesar Rp 2,7 miliar, pada unit Logistik Sentral berupa *overstated* persediaan barang sebesar Rp 23,9 miliar, pada unit Pedagang Besar Farmasi berupa *overstated* persediaan sebesar Rp 8,1 miliar dan *overstated* penjualan sebesar Rp 10,7 miliar (davidparsaoran.wordpress.com).

Kasus manipulasi laporan keuangan yang terjadi menurunkan kepercayaan pengguna laporan keuangan terhadap integritas laporan. Laporan keuangan merupakan sumber informasi untuk mengetahui kondisi ekonomis suatu perusahaan. Informasi yang terkandung dalam laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan ekonomi, maka akan sangat penting jika laporan keuangan yang disajikan adalah laporan keuangan yang berintegritas terutama pada perusahaan yang *go public*, seperti perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang sahamnya diperjualbelikan kepada masyarakat (Dewi dan Putra, 2016).

Banyaknya isu manipulasi laporan keuangan serta adanya inkonsistensi riset empiris hasil-hasil penelitian sebelumnya menyebabkan peneliti termotivasi untuk

melakukan penelitian kembali mengenai **“Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, dan Komite Audit, Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Apakah ukuran kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019?
2. Apakah kepemilikan institutional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di telah diajukan dalam penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019.
3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019.

4. Untuk menguji apakah komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI Tahun 2018-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran dan pemahaman serta memperluas pengetahuan dan wawasan mahasiswa mengenai pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institutional, Komisaris Independen, dan Komite Audit, Terhadap Kinerja Keuangan khususnya pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2019. Pemahaman pengetahuan atas hal-hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan pemikiran untuk mengembangkan konsep teoritis atau pemikiran baru untuk mengatasi kesenjangan teoritis dan empiris di dalam penerapan, kontrol, penilaian dan evaluasi pelaksanaan GCG pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

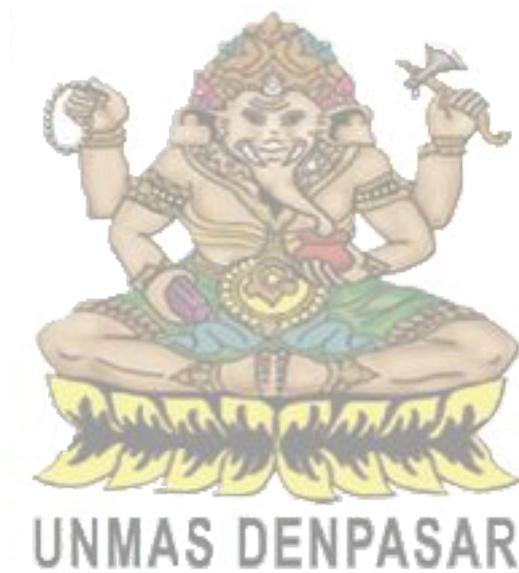
2. Manfaat praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam mengambil keputusan, serta dapat digunakan untuk menentukan dan mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan usaha peningkatan kualitas kinerja perusahaan.

b. Bagi Peneliti lain

Bagi peneliti lain, hasil studi ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan bagi peneliti lain yang berminat melakukan penelitian sejenis tetapi dengan sudut pandang atau pendekatan berbeda, dengan sampel seta populasi yang juga berbeda.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan (*agency theory*) berusaha untuk menjawab masalah keagenan yang disebabkan karena pihak-pihak yang menjalin kerja sama dalam suatu perusahaan mempunyai tujuan yang berbeda, dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam mengelola suatu perusahaan. Teori keagenan ini muncul ketika terjadi sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan mendukung dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh prinsipal.

Berkaitan dengan masalah keagenan, *good corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Menurut (Eisenhardt, 1989) teori keagenan oleh beberapa asumsi yang dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu asumsi sifat manusia, asumsi keorganisasian dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*selfinterest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai risiko (*risk aversion*). Asumsi keorganisasian adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Asumsi informasi adalah informasi sebagai barang komoditi yang bisa diperjual belikan. Berkaitan dengan masalah keagenan, *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori

keagenan diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. (Shleifet dan Vishny, 1997) .

Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri/ menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana/capital yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer.

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan biaya keagenan dalam tiga jenis, yaitu:

- a. Biaya monitoring (monitoring cost), pengeluaran biaya yang dirancang untuk mengawasi aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh agen.
- b. Biaya bonding (bonding cost), untuk menjamin bahwa agen tidak akan bertindak yang dapat merugikan principal, atau untuk meyakinkan bahwa principal akan memberikan kompensasi jika dia benar-benar melakukan tindakan yang tepat.
- c. Kerugian residual (Residual Loss), merupakan nilai uang yang ekuivalen dengan pengurangan kemakmuran yang dialami oleh principal sebagai akibat dari perbedaan kepentingan.

2.2 *Good Corporate Governance (GCG)*

Corporate governance adalah suatu konsep yang menyangkut struktur perseroan, pembagian tugas, pembagian kewenangan dan pembagian beban tanggung jawab dari masing-masing unsur yang membentuk struktur perseroan, dan mekanisme yang harus ditempuh oleh masing-masing unsur dari perseroan tersebut, serta hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan itu mulai dari rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, komisaris, juga mengatur hubungan-hubungan antara unsur-unsur dari struktur perseroan dengan unsur-unsur di luar perseroan yang pada hakekatnya merupakan stakeholders dari perseroan, yaitu negara yang sangat berkepentingan akan perolehan pajak dari perseroan yang bersangkutan, dan masyarakat luas yang meliputi para investor publik dari perseroan itu (dalam hal perseroan merupakan perusahaan publik), calon investor, kreditor dan calon kreditor perseroan.

Veno (2015) istilah *Good corporate governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan stakeholders, seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip *Good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak - pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal.

Corporate governance menurut *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang

saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholders yang lain.

Corporate governance menurut *Forum For Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

2.3 Prinsip-Prinsip *Corporate governance*

Dalam Hardikasari (2011), secara umum, penerapan *Corporate Governance* secara konkret, memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

- a. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
- b. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
- c. Memberikan kepuasan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
- d. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan diri stakeholder terhadap perusahaan.
- e. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Dari berbagai tujuan tersebut pemenuhan kepentingan seluruh stakeholder secara seimbang berdasarkan peran dan fungsinya masing-masing dalam suatu perusahaan merupakan tujuan utama yang hendak dicapai.

Prinsip-prinsip dari *Corporate governance* yang menjadi indikator, sebagaimana dijelaskan oleh *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), adalah:

a. Transparency (Transparansi)

Transparansi adalah adanya pengungkapan suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat dibandingkan dengan keadaan yang menyangkut tentang keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang materiil dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemakai kepentingan.

b. Accountability (Akuntabilitas)

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi monitoring, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

c. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Responsibility (Pertanggungjawaban) adalah adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Prinsip ini mewujudkan dengan kesadaran bahwa tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menyadari akan adanya tanggung jawab sosial, menghindari penyalahgunaan wewenang kekuasaan, menjadi profesional dan menjunjung etika dan memelihara bisnis yang kuat.

d. Independensi (independen)

Untuk melancarkan asas Corporate Governance, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling

mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Independen diperlukan untuk menghindari adanya potensi konflik kepentingan yang mungkin timbul oleh para pemegang saham mayoritas. Mekanisme ini menuntut adanya rentang kekuasaan antara komposisi komite dalam komisaris, dan pihak luar seperti auditor. Keputusan yang dibuat dan proses yang terjadi harus obyektif tidak dipengaruhi oleh kekuatan pihak-pihak tertentu.

e. Fairness (Keadilan)

Prinsip keadilan (fairness) merupakan prinsip perlakuan yang adil bagi seluruh pemegang saham. Keadilan disini diartikan sebagai perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham.

2.4 Indikator Mekanisme Corporate Governance

1. Dewan Komisaris Independen

Dewan Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perseroan. Dewan komisaris independen berperan sebagai penyeimbang dalam pengambilan keputusan dewan komisaris.

Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi jalannya perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance. Selain itu dewan komisaris memiliki kewajiban untuk mengawasi kinerja dewan direksi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan dari dewan direksi. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 disebutkan bahwa jumlah anggota dewan

komisaris minimal 3 orang atau paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi. Dewan komisaris terdiri dari komisaris dan komisaris independen, dan minimal 50% dari jumlah anggota dewan komisaris adalah komisaris independen.

2. Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

Keanggotaan komite audit sesuai dengan peraturan BEI adalah sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota. Seorang diantaranya adalah komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit.

a. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,

4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

Adapun selain tugas dari komite audit yang telah diuraikan diatas, komite audit juga memiliki tanggung jawab, antara lain adalah:

- a. Memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usahanya, dan rencana jangka panjang.
- b. Memastikan perusahaan dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku, melaksanakan usahanya dengan beretika, dan melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
- c. Mengawasi perusahaan termasuk didalamnya pemahaman tentang masalah yang berpotensi mengandung resiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

b. Manfaat dan Tujuan Pembentukan Komite Audit

Manfaat komite audit yang dibentuk sebagai komite khusus diperusahaan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggung jawab penuh dari dewan komisaris serta bermanfaat untuk memberdayakan fungsi komisaris dalam melakukan pengawasan

Tujuan dari pembentukan komite audit adalah:

- a. Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berlaku Umum (PABU).
- b. Memastikan bahwa pengendalian internalnya memadai.
- c. Menindaklanjuti terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.
- d. Merekomendasi seleksi auditor internal dan memberikan pengawasan menyeluruh.

d. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan saham manajerial dapat membantu penyatuan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer. Semakin meningkat proporsi kepemilikan saham manajerial maka semakin baik kinerja perusahaan. Menurut Tarigan dkk., dalam Nilayanti (2016), kepemilikan manajerial adalah kondisi dimana manajer yang bertindak sebagai agen tetapi juga mendapatkan hak atas kepemilikan saham perusahaan. Berdasarkan penelitian dari Samrotun (2020) dan Hermiyetti (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan manajerial maka kinerja perusahaan akan meningkat. Kepemilikan manajerial meningkatkan kinerja perusahaan karena manajer termotivasi untuk menggandakan upayanya sebagai bagian dari pemegang saham untuk

mewujudkan kekayaan perusahaan. Namun berbeda dengan penelitian dari Gie (2019) dan Julasti, dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini disebabkan karena direktur tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional perusahaan sehingga menyebabkan pengambilan keputusan yang tidak efektif. Jika direktur tidak memiliki kepemilikan saham maka direktur tidak optimal meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dalam pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan menguntungkan pihak pemilik saham.

e. Kepemilikan Institutional

Kepemilikan Institutional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh institusi pendiri perusahaan, bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dengan presentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi intern (Sujoko dalam Samrotun, 2016). Dalam kepemilikan institusional ini, *stakeholder* juga bertanggung jawab atas kemajuan perusahaan itu. Keberadaan investor institusional mampu menjadi mekanisme monitoring efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Penerapan kepemilikan insitusional mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian dari Candradewi, dkk. (2016) dan Hermiyetti (2017) menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini berarti semakin besar jumlah proporsi kepemilikan institusional, semakin meningkat juga kinerja keuangan perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga kepemilikan

institusional menjadi mekanisme yang handal dan mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerja perusahaan. Berbeda dengan penelitian dari Samrotun (2020) dan Nugrahawati (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini berarti tinggi rendahnya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan kemungkinan disebabkan karena tinggi rendahnya kepemilikan institusional menyebabkan proses monitoring terhadap manajer kurang efektif sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Nugrahawati (2019).

2.5 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui kinerja perusahaan dalam periode tertentu. Kinerja keuangan perusahaan sangat erat kaitannya dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan atas kegiatan operasional perusahaan agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi (Jumingan, 2011):

- a. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan, merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).

- b. Analisis Tren (tendensi posisi), merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan.
- c. Analisis Persentase per-Komponen (common size), merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing- masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
- d. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja, merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan
- e. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas, merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
- f. Analisis Rasio Keuangan, merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
- g. Analisis Perubahan Laba Kotor, merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
- h. Analisis Break Even, merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian.

Berdasarkan penjelasan teknik analisis keuangan yang sudah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini memilih untuk menggunakan analisis rasio keuangan. Menurut Harahap (2011) analisis rasio keuangan memiliki beberapa kelebihan, yaitu:

- a. Hasilnya berupa angka-angka yang lebih mudah dibaca dan ditafsirkan.

- b. Menjadi pengganti yang lebih sederhana dari informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang sangat rinci dan rumit.
- c. Menjadi alat pembanding antar perusahaan dengan melihat perkembangan perusahaan secara periodik.
- d. Lebih mudah melihat tren perusahaan serta melakukan prediksi di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan merupakan pondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Kinerja keuangan yang akan diukur dalam penelitian ini yaitu Return On Asset (ROA)

- a. Return On Asset (ROA)

Return on asset merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir, 2012). ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. ROA merupakan salah satu bentuk rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk mengukur kemampuan perusahaan atas keseluruhan dana yang ditanamkan dalam kegiatan operasi perusahaan yang bertujuan untuk menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian Melia & Yulius (2015) bertujuan untuk menguji pengaruh antara good corporate governance yang diproksikan dengan dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan. Dewan komisaris, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial digunakan sebagai variabel independen. Kinerja perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan ROA sebagai ukuran dan sebagai variabel dependen. Penelitian ini juga menggunakan variabel control yaitu ukuran perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris, komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan secara simultan berpengaruh terhadap ROA. Secara parsial, dewan komisaris dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap ROA. Sedangkan, komisaris independen dan ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap ROA. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel dewan komisaris dan ukuran perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan.

Yuni & Nur (2015) meneliti tentang pengaruh corporate governance yang diproksi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan corporate social responsibility sebagai variabel intervening. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa corporate governance yang diproksi kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan. Sedangkan kepemilikan manajerial dan komite audit tidak

berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel ukuran dewan komisaris dan *corporate social responsibility*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan.

Penelitian dari Candradewi, dkk. (2016) bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap ROA. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap ROA. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan.

Penelitian dari Hermiyetti (2017) yang bertujuan untuk menguji pengaruh mekanisme *good corporate governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing, dan komite audit memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kepemilikan asing. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan kinerja perusahaan.

Penelitian Fidiana & Sulistyowati (2017) bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* yang terdiri atas dewan direksi, dewan

komisaris, komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan pada perusahaan perbankan di Indonesia pada tahun 2012-2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan direksi dan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel dewan direksi dan penelitian dilakukan di perusahaan manufaktur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, kepemilikan manajerial dan kinerja perusahaan.

Penelitian dari Sarafina (2017) bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh simultan dan dominan *Good Corporate Governance* yang terdiri dari variabel Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan yang dihitung menggunakan *Return On Assets* dan *Tobins'Q*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara parsial masing-masing variabel *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel nilai perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, komite audit dan kinerja perusahaan.

Penelitian dari Nugrahawati (2019) bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan

kepemilikan institusional, kepemilikan asing dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel kepemilikan asing dan ukuran perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan kinerja perusahaan

Penelitian Yuliani (2018) bertujuan untuk menguji pengaruh Good Corporate Governance (dengan proksi Aktivitas Dewan Komisaris, Ukuran Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Komite Audit dan aktivitas Dewan Pengawas Syariah terhadap Kinerja Keuangan Perbankan Syariah). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Aktivitas Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, Ukuran Komite Audit berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan, sedangkan variabel Ukuran Dewan Komisaris Independen, Ukuran Dewan Direksi dan Aktivitas Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sekarang tidak menggunakan variabel aktivitas dewan komisaris, dan aktivitas Dewan Pengawas Syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, komite audit dan kinerja perusahaan.

Penelitian Gumilang (2018) yang menguji pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. tata kelola perusahaan yang baik diidentifikasi oleh proporsi komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional, Indikator kinerja keuangan diukur dengan return on equity (ROE) menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara

proporsi komisaris independen dan kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan. Namun tidak ditemukan bahwa komite audit dan kepemilikan manajerial memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan

Penelitian dari Samrotun (2020) bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu variabel komisaris independen, komite audit, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional

BAB III

KERANGKA BERPIKIR DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Berpikir

Perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya selalu mengedepankan yang terbaik bagi semua pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Hal tersebut tidak lepas dari peran manajemen dalam mengatur dan mengelola perusahaan. Kinerja manajemen yang baik tercermin dari kinerja perusahaannya yang baik pula.